

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komoditas pangan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat mempertahankan hidup. Oleh karenanya pemenuhan kebutuhan pangan bagi penduduk setiap waktu merupakan hak asasi manusia. Dari berbagai jenis pangan (pokok), beras merupakan salah satu jenis pangan yang paling strategis di Indonesia. Dalam undang-undang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Ketersediaan pangan ditentukan oleh aspek produksi, perdagangan (*ekspor, impor*), transfer (bantuan, hibah), dan stok. Dari berbagai aspek tersebut, terjaminnya ketersediaan distribusi. Ketergantungan komoditi beras pada luar negeri menjadi masalah yang besar bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan beras merupakan sumber bahan pangan lainnya. Tingginya ketergantungan terhadap produk luar negeri menyebabkan terjadi penurunan produksi beras baik didalam maupun diluar negeri akan berdampak pada melemahnya ketahanan pangan nasional (Hadew, 2004 : 99).

Beras merupakan komoditi yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, baik sebagai makanan pokok maupun sebagai komoditi strategis. Sebagai makanan pokok, diperkirakan lebih dari 95% masyarakat Indonesia mengkonsumsi beras. Sebagai komoditi strategis, fluktuasi harga yang terlalu tinggi, disatu sisi dapat memberatkan daya beli masyarakat, sementara disisi lain dapat merugikan petani. Tingginya konsumsi beras mengakibatkan permintaan beras didalam negeri tinggi dan tidak seimbang dengan ketersediaan beras. Sebagai komoditi strategis, fluktuasi harga yang terlalu tinggi, disatu sisi dapat memberatkan daya beli, masyarakat, sementara disisi lain dapat merugikan petani. Tingginya konsumsi beras mengakibatkan permintaan beras didalam negeri tinggi dan tidak seimbang dengan ketersediaan beras. Oleh karena itu pemerintah melakukan kebijakan *impor* beras. Tingginya jumlah *impor* beras menyebabkan

masalah bagi petani di Indonesia terutama dalam persaingan harga dengan beras impor murah yang mendapatkan subsidi dari negara asalnya, (Krisnamurthi, B. 2006).

Efektifitas dan *efisiensi* distribusi terkait pula dengan sistem manajemen yang diterapkan pada satu perusahaan atau instansi baik bergerak dibidang produksi maupun jasa. Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) merupakan salah satu perusahaan milik pemerintah yang bergerak disektor jasa distribusi dan menyerapan produk beras yang ditantang untuk menggunakan standar penyaluran distribusi yang memiliki kualitas dan berdasarkan pada prinsip-prinsip manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, penerapan, dan evaluasi sebagai suatu sistem manajemen yang menjadi bagian dari penelitian ini.

Oleh karena itu keberhasilan perusahaan ini akan menjadi barometer penting dalam penerapan fungsi-fungsi manajemen yang telah disampaikan pada paragraf sebelumnya, fakta menunjukkan bahwa Perum Bulog yang bergerak dan berfungsi sebagai pelaksana sistem pangan nasional yang telah memiliki standar atau mutu dimana perusahaan ini terus bersifat dinamis untuk menyesuaikan kondisi kebutuhan pangan nasional termasuk pangan di Kota Gorontalo yang notabene terus mengalami peningkatan seiring dengan naiknya angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo termasuk di Kota Gorontalo.

Berdasarkan survei pada September 2015, presentase penduduk miskin di Kota Gorontalo September 2015 sebesar 6,84%. Dibandingkan presentase penduduk miskin Maret 2015 sebesar 6,48%. Jumlah penduduk miskin September 2015 di Provinsi Gorontalo sebanyak 27.007 jiwa, sementara jumlah penduduk miskin Maret 2015 sebanyak 25.365 jiwa. Dengan demikian jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo selama periode Maret 2015 – September 2015 bertambah 1.642 Jiwa (BPS Provinsi Gorontalo, 2015).

Program Raskin dimulai sejak tahun 1998 dengan nama OPK (Operasi Pasar Khusus) yang berfungsi sebagai program darurat (*social safety net*) untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga miskin setelah krisis moneter terjadi tahun 1997. Pada tahun 2002, fungsi program diperluas sebagai perlindungan

sosial masyarakat (*social protection*) dan namanya diubah menjadi Raskin agar lebih tepat sasaran (Bulog, 2010a).

Program Raskin merupakan subsidi pangan sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin yang menurut Pagu (Plafon Gubernur) Alokasi Raskin Provinsi Gorontalo 2015, masing-masing keluarga akan menerima minimal 15 kg /RTS/ bulan dengan durasi waktu pendistribusian selama 12 bulan dengan harga netto sebesar Rp. 1.600 / kg di titik distribusi.

Berdasarkan data yang ada, pagu raskin untuk Kota Gorontalo tahun 2015 jumlah penerima sebanyak 7.408 Rumah Tangga Sasaran Penerimaan Manfaat (RTS-PM) dengan jumlah kuantum Raskin 1.600 kg/bulan atau 1.333.440 kg/tahun.

Dari survei dan pengamatan yang dilakukan terkait dengan manajemen dan pengembangan strategi distribusi pada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog Sub Divre Kota Gorontalo) ditemukan kondisi bahwa penerapan manajemen dan pengembangan strategi distribusi haru lebih ditingkatkan lagi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan manajemen dan peran Perum Bulog pada pendistribusian beras di Kota Gorontalo ?
2. Faktor-faktor dan strategi apa yang dominan pada pengembangan distribusi beras di Perum Bulog Divire Kota Gorontalo ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan untuk penelitian adalah, untuk mengetahui :

1. Mengetahui bagaimana penerapan manajemen dan peran Perum Bulog pada pendistribusian beras di Kota Gorontalo.
2. Mengetahui faktor-faktor dan strategi apa yang dominan pada pengembangan distribusi beras di Perum Bulog Sub Divre Kota Gorontalo.

D. Manfaat

1. Untuk meningkatkan dan memperluas pengetahuan penulis dalam menganalisis masalah-masalah yang ada di dalam lapangan tentang pendistribusian beras.
2. Menambah wawasan pengetahuan tentang pendistribusian beras di Perum Bulog Sub Divre Kota Gorontalo.
3. Memberikan manfaat kepada perusahaan sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam keputusan usahanya untuk dapat meningkatkan pendistribusian beras dan efisiensinya.